

Pendidikan Kristiani Mereduksi Hegemoni Politik Identitas: Upaya Membangun Demokrasi dan Kebebasan Berpolitik

DOI: <https://doi.org/10.47543/efata.v10i1.132>

Yonatan Alex Arifianto

Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga

Correspondence: arifianto.alex@sttsangkakala.ac.id

Abstract: The phenomenon of identity politics has had a negative impact in the form of social segregation and conflict that has the potential to lead to division. The government urges all parties to maintain the unity and integrity of the nation through various means, one of which is launching a religious moderation program several years ago. Religion is considered essential and crucial in the issue of identity politics. This research aims to initiate the role of Christian education in reducing the hegemony of identity politics. By using descriptive analysis methods through literature studies from research results on identity politics and the essence of Christian education, a religious format is produced that can reduce the hegemony of identity politics. In conclusion, Christian education can be a way for the church to build a political paradigm with integrity and a democratic political situation.

Keywords: church and politics; Christian education; hegemony of identity politics

Abstrak: Fenomena politik identitas telah memberikan dampak negatif berupa segregasi sosial hingga konflik yang berpotensi pada perpecahan. Pemerintah mendesak semua pihak agar memelihara kesatuan dan keutuhan bangsa melalui berbagai cara, yang salah satunya adalah meluncurkan program moderasi beragama beberapa tahun lalu. Agama dianggap penting dan krusial dalam perosalan politik identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menginisiasi peran pendidikan kristiani dalam mereduksi hegemoni politik identitas. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif melalui kajian literatur dari hasil penelitian tentang politik identitas dan esensi pendidikan kristiani, dihasilkan sebuah format beragama yang mampu mereduksi hegemoni politik identitas. Simpulannya, pendidikan kristiani dapat menjadi cara gereja membangun paradigma politik yang berintegritas dan situasi berpolitik yang demokratis.

Kata Kunci: gereja dan politik; hegemoni politik identitas; pendidikan kristiani

PENDAHULUAN

Indonesia dari awal kemerdekaan sampai hari ini merupakan salah satu negara yang kaya akan berbagai kekayaan sumber daya alam dan juga kaya akan identitas pada masyarakatnya yang menempati di berbagai pulau yang terbilang 17.000. Identitas dari berbagai kelompok dan suku tersebut tentu rentan terjadinya berbagai isu rasisme hingga adanya isu SARA yang berakibat adanya konflik dan kekerasan secara horizontal, sehingga konflik dan permasalahan tersebut kemudian berimplikasi ke segala aspek kehidupan bermasyarakat, khususnya pada aspek politik. Oleh karena itu, persoalan dan konflik-konflik kepentingan ini beririsan antara isu identitas atau keanekaragaman dengan aspek politik,

sehingga timbulnya sebuah isu yang dikenal dengan politik identitas.¹ Politik ini muncul setelah era reformasi, yang mana sampai saat ini kehidupan bangsa Indonesia menghadapi tantangan merebaknya politik identitas yang mengedepankan golongan atau simbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik.² Dan faktanya isu politik identitas menjadi pilihan para politikus yang mana jalan politik tersebut mengutamakan kepentingan individu atau identitas kelompok dalam masyarakat yang ikut dalam jalan menjadi kuasa melalui kontestasi politik di Indonesia, seperti pemilihan umum presiden, legislatif, hingga kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota.³ Politik identitas adalah politik yang pada dasarnya menganut persamaan identitas untuk menaikkan derajat suatu kelompok karena adanya rasa tidak berharga. Politik ini telah mengalami perkembangan yang sebelumnya mengangkat derajat kelompok tertentu menjadi alat politik yang ditunggangi, oleh elit politik untuk keuntungan pribadi dan untuk mendapatkan suara pada saat pemilu.⁴

Meski pada dasarnya politik identitas adalah gerakan yang sifatnya positif dan bahkan bisa memperkuat gerakan demokrasi karena lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, namun dalam perkembangannya mengalami pergeseran, bahkan menuai masalah saat hadir dalam konteks politik lokal, khususnya di negara-negara plural dan multikultural.⁵ Dewasa ini politik maupun demokrasi seringkali digunakan sebagai alat dan permainan bagi mereka yang berada di kursi kekuasaan. Perebutan kursi kekuasaan ini juga pun selalu diwarnai dengan saling menjatuhkan personal sampai kepada identitas dari lawan politiknya dengan berbagai cara atau biasa didengar dengan sebutan Politik Identitas.⁶ Dan penekanannya dari politik identitas ini terjadi ketika kelompok identitas minoritas dikesampingkan dari kelompok identitas mayoritas.⁷

Berkaitan dengan topik artikel ini, pendidikan kristen dalam mereduksi hegemoni politik identitas: upaya membangun demokrasi dan kebebasan berpolitik. Muh Khamdan dalam penelitiannya membahas identitas dalam politik cenderung digunakan sebagai alat untuk *framing* gerakan sosial, sehingga berdampak pada lahirnya intoleransi dan radikalisme.⁸ Sentimen identitas di Indonesia menjadi sangat kuat karena adanya mayoritas yang merasakan sebagai minoritas. Sehingga, agama dan politik selalu menjadi tema yang mengiringi penyelenggaraan proses demokrasi. Demikian yang dilakukan oleh Arie Sujito, merefleksikan pergulatan pengalaman Pemilu/Pilpres 2014 dan Pemilu/Pilpres 2019 menjadi kesaksian sejarah satu dekade terakhir, bahwa pengerahan identitas agama, ras dan etnis (SARA) memicu ketegangan sosial dalam masyarakat multikultural.⁹

¹ Aldho Faruqi Tutukansa, "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia," *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 14, no. 1 (2022): 20–30.

² I Putu Sastra Wingarta et al., "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 117–124.

³ Tutukansa, "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia."

⁴ Junaidin Basri, Syakira Ainun Nisa Basri, and Irma Indriyani, "Risiko Politik Identitas Terhadap Pluralisme Di Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (2022): 1027–1035.

⁵ Idham Idham and Suaib Amin Pranowo, "Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya," *Jurnal Renaissance* 5, no. 2 (2020): 650–661.

⁶ Nada Okavia and Hairul Dharma Widagdo, "Politik Identitas: Konstruksi Pemikiran Amy Gutmann Dalam Menyikapi Pesta Politik Tahun 2019," *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya* 7, no. 1 (2018): 9–26.

⁷ Desi Wasari, Reni Triposa, and Yonatan Alex Arifianto, "Etika Guru PAK Bagi Sikap Etis Politik Identitas Dalam Mereduksi Superioritas," *Philoxenia: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1 (2022): 1–13.

⁸ Muh Khamdan, *Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa: Kontestasi Dalam Politik Elektoral Di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2022).

⁹ Arie Sujito, "Pancasila Dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024," *Jurnal Pancasila* 3, no. 2 (2022): 13–32.

Berdasarkan latar belakang masalah, fenomena dan penelitian terdahulu, terdapat *gap* riset yang belum diteliti, yakni tentang hegemoni kekuasaan dalam mengaktualisasi politik identitas, yang dikaji dari pandangan dan bingkai pendidikan kristiani. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada umat Tuhan dan kekristenan pada umumnya supaya memiliki pengetahuan dan paradigma pendidikan kristen dalam mereduksi hegemoni politik identitas, hal ini sebagai langkah konkrit untuk membangun demokrasi dan kebebasan berpolitik.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggali dan menguraikan fenomena Hegemoni kekuasaan dalam mengaktualisasi politik identitas yang dideskripsikan sebagai bentuk untuk membangun demokrasi dan kebebasan berpolitik, di mana kajian tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman dan juga mereduksi politik identitas dalam masyarakat khususnya warga gereja. Oleh karenanya metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,¹⁰ yang memusatkan pada pendidikan. Sumber data utama yang digali dalam penelitian ini adalah teks Alkitab yang menelusuri tentang pendidikan kristiani berkaitan dengan pendidikan politik. Selanjutnya didukung oleh berbagai kajian teori literatur yang bertema relevan antara lain dari berbagai artikel jurnal, artikel umum dalam fenomena viral saat ini yaitu politik identitas, begitu juga dengan pencarian data dari portal berita nasional. Tentunya hasil eksplorasi sosial dari berbagai media dalam kontek platform digital dan internet, buku dan literatur lainnya tidak dilupakan untuk melengkapi data di mana hegemoni politik identitas. Dengan demikian pendekatan yang dipergunakan adalah analisis deskriptif naratif studi pustaka terkait politik identitas. Pembahasan dipetakan dalam beberapa poin seperti kajian teoretik politik identitas, politik identitas kaitannya terhadap demokrasi dan kebebasan berpolitik, dan bagaimana pendidikan kristiani mereduksi hegemoni politik identitas yang harus dimunculkan sebagai konstruk teologi. Akhirnya dalam pendidikan kristiani dan pemenuhan literasi digital serta tanggung jawab orang Kristen terhadap politik identitas. Selanjutnya hasil kajian dinarasikan sebagai pola aktualisasi dari pendidikan kristiani dalam mendistorsi politik identitas yang mana hal itu dapat diaplikasikan oleh kekristenan di era digital ini sebagai bagian dari demokrasi dan kebebasan berpolitik.

PEMBAHASAN

Kajian Teoretik Politik Identitas

Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki masyarakat yang heterogen secara agama dan etnisitas, bahasa sehingga munculnya politik identitas tidak bisa dihindari. Sebab di mana demokrasi yang dibangun berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, ada juga keinginan kelompok identitas menginginkan kemajuan agenda golongannya dan terancam merusak dan menghancurkan demokrasi dan kebebasan berpolitik oleh karena nafsu politik yang jahat.¹¹ Walaupun faktanya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural namun bisa saja diterjang fenomena politik identitas dengan mengungis isu keagamaan, etnis, kelompok. Sehingga kebenaran dalam menegakkan kebersamaan tidak lagi mudah untuk dikenali secara objektif karena adanya unsur politik kepentingan

¹⁰ Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

¹¹ Obet Nego, "Teologi Multikultural Sebagai Respon Terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas Di Indonesia," *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no. 2 (November 2020): 121–139.

berkedok identitas, dengan dalihnya yang melibatkan aspek emosional publik.¹² Yang menekankan dan diekspresikan dalam perilaku politik yang lebih didasarkan pada identitas agama dan keyakinan yang sama daripada faktor kekerabatan dan kedaerahan yang perlu dibangun dan dimajukan.¹³

Politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau lainnya. Dengan tujuan tertentu misalnya, sebagai alat untuk menunjukkan jati diri atau identitas dari suatu kelompok tersebut.¹⁴ Dan politisasi identitas yang berkembang saat ini dilandaskan pada kebencian dan bertujuan untuk mempromosikan nilai yang mengutamakan kepentingan individu maupun kelompok sendiri, yang diaktualkan dengan menunjukkan dan menekankan cara pandang antagonis terhadap kelompok identitas lain serta melegitimasi kekerasan,¹⁵ sebagai cara untuk merengkuh kekuasaan, sehingga politik identitas menimbulkan perpecahan kelompok di masyarakat, sistem demokrasi yang tidak sehat, dan menunjukan buruknya pendidikan politik bagi rakyat.¹⁶ Di mana politik identitas juga sangat berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan di masyarakat ketika umat beragama hidup bersama dengan umat beragama lain di ruang publik.¹⁷

Politik Identitas dan Ekspresi Berdemokrasi: Sebuah perspektif teologi Kristen

Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas negara untuk di jalankan oleh pemerintahan Negara tersebut.¹⁸ Dengan adanya demokrasi maka hal yang paling logis dalam pemahaman terkait demokrasi yang paling substansial adalah pemilihan umum baik memilih legeslatif maupun pemimpin kepala daerah. Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih para pejabat-pejabat dalam pemerintahan.¹⁹ Dan pemilihan umum adalah bagian dari kebebasan berpolitik. Di mana hak dan suara pemilih sangat dihargai. Namun untuk meraup suara para kontesta politik menggunakan berbagai macam cara dan agenda yang menekankan kesamaan baik agama, suku maupun kelompok. Inilah yang merusak demokrasi dan kebebasan ketika politik berada dalam asas kepentingan pribadi dan bukan kepentingan bangsa yang memang bermacam-macam perbedaan. Oleh karena itu politik identitas yang dimainkan harus dijaga, agar tidak menimbulkan kebencian dan konflik sesama anak bangsa dan tentunya agar sejalan dengan keberagaman Indonesia yang kaya akan budaya, ras, suku, dan

¹² Gregorius Loudowick Lengga Wangge and Robertus Wijanarko, "Politik Identitas Era Post-Truth Di Indonesia Dalam Perspektif Language Games Ludwig Wittgenstein," *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (2023): 152–161.

¹³ Ratna Istianaha and Saehudin, "Politik Identitas Dan Perilaku Politik Kiai Di Kota Sukabumi Menjelang Pemilihan Umum 2024," *ELECTORAL GOVERNANCE: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 233–250.

¹⁴ Desri Siagian, Ranto Ranto, and Rini Archda Saputri, "Politik Identitas : Strategi Negosiasi Marga Dalam Pernikahan Amalgamasi Pada Etnis Batak Dan Melayu," *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 3 (2021): 80–85.

¹⁵ Idham and Amin Pranowo, "Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya."

¹⁶ Fitria Wulan Dhani, "Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada," *Metacommunication: Journal of Communication Studies* 4, no. 1 (2019): 143–150.

¹⁷ Paulus Sugeng Widjaja, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky, "Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahan* 6, no. 1 (2021): 95–102.

¹⁸ Dedimus Kodi, "Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia," *Politika* (2018).

¹⁹ Affan Sulaeman, "Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah," *CosmoGov* 1, no. 1 (2017): 12–21.

bahasa demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.²⁰ Namun mirinya politik identitas saat ini menggunakan kepercayaan dan Isu agama menjadi komoditas politik yang turut serta mewarnai perpolitikan untuk menguasai jabatan. Maka masyarakat dapat menilai bahwa para politikus saat ini sebagian meninggalkan etika dan terlebih mendahulukan kepentingan.²¹ Bahkan pencitraan dan identitas politik menjadi ajang yang dilakukan oleh para politikus untuk memenangkan suara rakyat.²²

Politik Identitas membuat orang yang berasal dari kelompok minoritas dikurangi haknya karena perbedaan latar belakang identitas yang menyebabkan diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan yang berasal dari golongan minoritas.²³ Hal inilah yang ditakutkan dalam dunia demokrasi, kebebasan tidak mendapat ruang dalam politik identitas. Karena kesamaan identitas harus dipilih dan dijadikan semangat keharusan untuk memilih pemimpin dari kesamaan-kesamaan tersebut. Dan bukan pada prestasi dan semangat dedikasi bekerja bagi masyarakat. Oleh karena itu pentingnya kebebasan berpolitik dapat menentukan nalar dalam memilih pemimpin yang bekerja keras bagi pembangunan dan bukan karena kesamaan yang ditonjolkan. Maraknya penggunaan isu politik identitas khususnya atas nama agama sangat berbahaya bagi pertumbuhan demokrasi dan proses politik yang sehat di Indonesia.²⁴ Karena jelas bahwa politik identitas dipahami sebagai konstruksi dalam menentukan kepentingan kelompok tertentu, yang akan menjadi sarana mencapai politik kekuasaan.²⁵ Sehingga sangat berbahaya, bila terpilih maka kepentingan pribadi dan kesamaan yang akan diutamakan. Inilah yang ditakutkan bagi kebebasan berpolitik dalam demokrasi. Karena akan menciptakan *gap* dan perselisihan sepanjang masa karena berdampak pada dendam dan perseteruan.

Dalam menjalankan politik identitas dan ekspresi berdemokrasi, orang Kristen didorong untuk mendasarkan tindakan dan keputusan mereka pada prinsip-prinsip Alkitab yang mendorong keadilan, kasih, pengampunan, dan tanggung jawab moral. Namun, penggunaan prinsip-prinsip ini dalam konteks politik konkret dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan aplikasi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Kristen. Terlebih bagi mereka yang menggunakan politik identitas sebagai sarana untuk berkuasa maka haruslah dapat menghormati dan menghargai sesamanya. Dan diharapkan tidak adanya arogansi bahkan tindakan persekusi bagi mereka yang terdampak dari politik identitas.

Pendidikan Kristiani dalam mereduksi Hegemoni Politik Identitas

Teori hegemoni merupakan sebuah teori politik paling penting abad XX. Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci (1891-1937). Antonio Gramsci dapat dipandang sebagai pemikir politik terpenting setelah Marx. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supre-

²⁰ Mentari Mentari and Hardi Alunaza, “Multikulturalisme Dan Politik Identitas Di Indonesia,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2022): 163–174.

²¹ Zuly Qodir, “Kebebasan Beragama Dan Negara,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (2021): 221–244.

²² Ira Aryanti Rasyi Lubis and Ridwan Fauzi Rabbani, “Pencitraan Dan Identitas Politik Bagi Masyarakat,” *Journal of Digital Communication Science* 1, no. 1 (2023): 42–55.

²³ Achmad Mujadid Salim, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Politik Identitas,” *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1185–1210.

²⁴ Osbin Samosir and Indah Novitasari, “Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 2, no. 3 (2022): 332–346.

²⁵ Sukron Romadhon and Try Subakti, “Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia,” *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 91–115.

masi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.²⁶ Hegemoni (*egemonia*), dalam bahasa aslinya, Yunani, berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya. Hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah kemenangan kelas yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus berbagai kekuatan sosial politik.²⁷ Melihat peran dari hegemoni, maka apa yang menjadi tujuan dari dominasi menggunakan kekuasaan lewat politik identitas sangat berdampak besar bagi demokrasi, bisa saja membawa kepada keburukan. Padahal dalam beragama, agama yang ada di Indonesia menuntut seluruh lapisan masyarakat untuk hidup bertoleransi dan memiliki rasa solidaritas kebangsaan yang tinggi.²⁸ Oleh sebab itu diperlukan pendidikan kristiani untuk mereduksi hegemoni politik identitas.

Pendidikan kristiani merupakan suatu proses pembelajaran mengenai koinonia, yaitu kehidupan persekutuan komunitas iman yang di dalamnya memiliki nilai-nilai kehidupan personal dan sosial di mana satu sama lain saling membangun.²⁹ Tentunya komunitas orang yang percaya kepada Kristus atau gereja dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan iman Kristen pada proses berpolitik.³⁰ Sebab gereja bukanlah lembaga politik. Gereja tidak menyamakan diri dengan sebuah partai politik. Akan tetapi, gereja melakukan pendidikan politik demi kemajuan berpikir dan nalar untuk membawa pada kesejahteraan masyarakat. Maka gereja sebagai edukasi dalam Pendidikan kristiani. Harusnya berdampak bagi orang Dewasa, di mana pendidikan politik melalui khotbah, buku, pemahaman Alkitab, dan yang lainnya menjadikan kekristenan tidak kerdil dalam menghadapi kekuasaan ataupun jabatan. Maka pendidikan politik bagi orang dewasa harus diprioritaskan untuk memberikan paradigma baru bahwa politik harus mengedepankan kebersamaan dan membangun kemanusiaan tanpa menyakiti maupun tanpa mendiskriminasi identitas tertentu. Dan publik harap mengetahui gereja bukan berarti mendukung bahwa kekristenan menjadi anggota suatu partai, melainkan umat Tuhan harus memiliki paradigma dan mempunyai kesadaran politik,³¹ dan Gereja mendukung kebebasan warganya berpolitik,³² untuk membangun nilai Bhennika Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa.

²⁶ Endah Siswati, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci," *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 5, no. 1 (2017): 11–33.

²⁷ Ibid.

²⁸ Mifdal Zusron Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015).

²⁹ Djoys Anake Rantung, "Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia," *Jurnal Shanana* 1, no. 2 (2017): 58–73.

³⁰ Ibid.

³¹ F S Manafe, "Sikap Kristen Dalam Arena Politik," *Missio Ecclesiae* 6, no. April (2017): 1–16.

³² Adolf Bastian Simamora, "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1–15.

Pandangan politik yang Alkitab merupakan di mana peran gereja harus menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.³³ Politik yang Alkitabiah juga dapat dinyatakan sebagai suatu upaya dan proses sadar untuk memahami dan memaknai realitas politik dari cara pandang dan pola pikir Alkitab. Sebagai orang percaya yang mau atau sudah terjun dalam dunia politik agar hidup sesuai kebenaran firman Tuhan.³⁴ Dan juga gereja hendaknya mengambil peran sebagai penyuluh terhadap praktik demokrasi yang bersih, jujur dan berwawasan kebangsaan yang didasarkan takut kepada Tuhan.³⁵ Dengan kajian yang membawa manusia untuk dapat melakukan yang baik dan berkenan kepada Tuhan, bersikaplah jujur dan miliki integritas sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berani menanggung risiko dari prinsip kebenaran yang dipegang teguh, dan menolak dosa dan tawaran duniawi³⁶, karena hal itu didasari bahwa berpolitik bukan berarti boleh kompromi dengan dosa atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam berpolitik semua orang percaya harus mengedepankan prinsip firman Tuhan supaya tidak terjadi hasil keputusan yang bertentangan dengan isi firman Tuhan (bdk. Mzm. 37:27).³⁷

Pendidikan kristiani memiliki potensi besar dan berdampak untuk membantu mereduksi hegemoni politik identitas dengan cara mengedukasi individu baik secara personal maupun komunal jemaat Tuhan tentang nilai-nilai universal yang membangun sisi kemanusiaan³⁸, yang tidak mementingkan agenda politik pribadi maupun identitas, toleransi, dan pluralisme. Namun, peran ini juga harus dijalankan dengan bijak dan seimbang untuk menghindari konflik dan diskriminasi. Di mana Pendidikan kristiani dapat mengajarkan moral dan nilai-nilai yang universal seperti kasih kepada sesama maupun kepada lawan politik, toleransi sebagai makhluk sosial dan tentunya belas kasihan, serta keadilan yang memang dibutuhkan dalam masyarakat saat ini. Pendidikan kristiani yang diaktualisasikan ini sejatinya dapat membantu individu maupun kelompok dapat memahami bahwa nilai-nilai ini tidak terbatas pada satu kelompok atau agama tertentu, melainkan dapat diterapkan oleh semua orang secara universal. Dan tentunya itu mengacu pada historis keberadaan bangsa Indonesia di mana agama-agama yang berbeda telah berkontribusi pada peradaban manusia dalam kemerdekaan. Pesan ini harusnya membantu menghapus intervensi dan prasangka terhadap agama-agama, Maupun suku lain dalam menegakkan persatuan dan kerukunan. Dan pendidikan kristiani sejatinya harus turut andil dalam mempromosikan pemahaman tentang masyarakat yang majemuk serta pluralisme agama. Gereja juga berperan mengajarkan umat Tuhan secara personal maupun komunal untuk menghormati kepercayaan dan praktik agama lain tanpa menekankan hegemoni politik identitas. Hal ini dapat membantu mengurangi hegemoni politik identitas yang sering kali didasarkan pada keyakinan agama yang eksklusif dan kepentingan individu dan agenda politik pribadi yang ditonjolkan.

Pendidikan kristen juga dapat memberikan pemahaman dan pengertian yang masif bagi warga gereja dan juga kepada para pemimpin Kristen atau kekristenan pada umumnya untuk memahami dan menghormati perbedaan serta berusaha untuk mewujudkan keadilan

³³ Ibid.

³⁴ Manafe, "Sikap Kristen Dalam Arena Politik."

³⁵ Hasahatan Hutahaean, "Teologi Politik Gereja; Menemukan Dan Memancarkan Tritugas Gereja Dalam Pilkada Dan Pilpres," *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (2021): 1–17.

³⁶ Manafe, "Sikap Kristen Dalam Arena Politik."

³⁷ Ibid.

³⁸ Bdk. Harls Evan Siahaan, Munatar Kause, and Fereddy Siagian, "Teologi Hospitalitas: Sebuah Diskursus Konstruktif Agama Merevitalisasi Nilai-Nilai Kemanusiaan," *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 134–143.

bagi semua individu tanpa memandang identitas agama atau etnis, golongan mereka. Tentunya pendidikan kristiani diharapkan tidak menjadi alat mendiskriminasi atau menghancurkan suku budaya, identitas, atau keyakinan lain, demi agenda politik yang kotor dan jahat. Gereja memberikan pendidikan kristiani yang selaras dengan nilai dan norma alkitabiah; menjadikan pendidikan yang seimbang dengan nilai kemanusiaan dan inklusif adalah kunci keberhasilan untuk mereduksi hegemoni politik identitas dan menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan harmonis, di mana masyarakat yang terdiri dari beranekaragam etnis, agama, dan budaya yang berbeda, diharapkan untuk dapat saling menghargai dan toleransi antarperbedaan yang ada.³⁹ Akibatnya, hegemoni politik identitas terhadap kebebasan berpolitik tidak menjadi senjata untuk meraup kekuasaan dan menghancurkannya. Tentunya pendidikan kristiani tidak hanya berkontribusi pada pembentukan individu yang beretika dan berintegritas dalam politik, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih aman, damai dan politik sehat.

KESIMPULAN

Politik identitas menjadi persoalan yang rumit bila masuk dalam perpolitikan untuk meraup jabatan kekuasaan. Peran dan fungsi pendidikan kristiani harus terlihat jelas dalam mengurangi dominasi hegemoni politik identitas dan mendorong perkembangan demokrasi serta kebebasan berpolitik. Pendidikan kristiani dianggap sebagai sarana untuk mempromosikan nilai-nilai universal seperti toleransi, keragaman, dan cara menghormati serta menghargai kemanusiaan. Pendidikan kristiani mewujudkan dan memberikan paradigma bagi kekristenan terkait kajian teoretik politik identitas sebagai pemahaman yang seimbang. Hal itu untuk mereduksi politik identitas dan kaitannya terhadap demokrasi dan kebebasan berpolitik, sehingga dominasi dari hegemoni politik identitas dapat direduksi dengan peran pendidikan kristiani. Pendidikan kristiani dalam mereduksi hegemoni politik identitas dapat dengan berbagai cara yaitu dengan memberikan pendidikan yang mempromosikan pemahaman dan dialog antarsuku, agama, dan budaya. Pendidikan kristiani juga dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Serta memberikan ruang dalam tanggung jawab sosial dan moral dalam politik, yang dapat mengurangi sikap intoleransi. Tentunya pendidikan kristiani tidak hanya berkontribusi pada pembentukan individu yang beretika dan berintegritas dalam politik, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih aman, damai, dengan politik yang sehat.

REFERENSI

- Achmad Mujadid Salim. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Politik Identitas." *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1185–1210.
- Alfaqi, Mifdal Zusron. "Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015).
- Basri, Junaidin, Syakira Ainun Nisa Basri, and Irma Indriyani. "Risiko Politik Identitas Terhadap Pluralisme Di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (2022): 1027–1035.
- Dhani, Fitria Wulan. "Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada." *Metacommunication: Journal of Communication Studies* 4, no. 1 (2019): 143–150.

³⁹ Muhammad Habibi, "Dinamika Politik Identitas Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 12–16.

- Habibi, Muhammad. "Dinamika Politik Identitas Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 12–16.
- Hutahaean, Hasahatan. "Teologi Politik Gereja; Menemukan Dan Memancarkan Tritugas Gereja Dalam Pilkada Dan Pilpres." *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (2021): 1–17.
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, and Reda Wicaksono. "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 117–124.
- Idham, Idham, and Suaib Amin Pranowo. "Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya." *Jurnal Renaissance* 5, no. 2 (2020): 650–661.
- Istianaha, Ratna, and Saehudin. "Politik Identitas Dan Perilaku Politik Kiai Di Kota Sukabumi Menjelang Pemilihan Umum 2024." *ELECTORAL GOVERNANCE: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 233–250.
- Khamdan, Muh. *Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa: Kontestasi Dalam Politik Elektoral Di Indonesia*. Penerbit A-Empat, 2022.
- Kodi, Dedimus. "Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia." *Politika* (2018).
- Lengga Wangge, Gregorius Loudowick, and Robertus Wijanarko. "Politik Identitas Era Post-Truth Di Indonesia Dalam Perspektif Language Games Ludwig Wittgenstein." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (2023): 152–161.
- Lubis, Ira Aryanti Rasyi, and Ridwan Fauzi Rabbani. "Pencitraan Dan Identitas Politik Bagi Masyarakat." *Journal of Digital Communication Science* 1, no. 1 (2023): 42–55.
- Manafe, F S. "Sikap Kristen Dalam Arena Politik." *Missio Ecclesiae* 6, no. April (2017): 1–16.
- Mentari, Mentari, and Hardi Alunaza. "Multikulturalisme Dan Politik Identitas Di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2022): 163–174.
- Nego, Obet. "Teologi Multikultural Sebagai Respon Terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas Di Indonesia." *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no. 2 (November 2020): 121–139.
- Okavia, Nada, and Hairul Dharma Widagdo. "Politik Identitas: Konstruksi Pemikiran Amy Gutmann Dalam Menyikapi Pesta Politik Tahun 2019." *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya* 7, no. 1 (2018): 9–26.
- Qodir, Zuly. "Kebebasan Beragama Dan Negara." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (2021): 221–244.
- Rantung, Djoys Anake. "Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia." *Jurnal Shanan* 1, no. 2 (2017): 58–73.
- Romadhon, Sukron, and Try Subakti. "Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 91–115.
- Samosir, Osbin, and Indah Novitasari. "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 2, no. 3 (2022): 332–346.
- Siagian, Desri, Ranto Ranto, and Rini Archda Saputri. "Politik Identitas : Strategi Negosiasi Marga Dalam Pernikahan Amalgamasi Pada Etnis Batak Dan Melayu." *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 3 (2021): 80–85.
- Siahaan, Harls Evan, Munatar Kause, and Fereddy Siagian. "Teologi Hospitalitas: Sebuah Diskursus Konstruktif Agama Merevitalisasi Nilai-Nilai Kemanusiaan." *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 134–143.

- Simamora, Adolf Bastian. "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1–15.
- Siswati, Endah. "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 5, no. 1 (2017): 11–33.
- Sujito, Arie. "Pancasila Dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024." *Jurnal Pancasila* 3, no. 2 (2022): 13–32.
- Sulaeman, Affan. "Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah." *CosmoGov* 1, no. 1 (2017): 12–21.
- Tutukansa, Aldho Faruqi. "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 14, no. 1 (2022): 20–30.
- Umrati, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 2020.
- Wasari, Desi, Reni Triposa, and Yonatan Alex Arifianto. "Etika Guru PAK Bagi Sikap Etis Politik Identitas Dalam Mereduksi Superioritas." *Philoxenia: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1 (2022): 1–13.
- Widjaja, Paulus Sugeng, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky. "Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (2021): 95–102.